

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes in Regulations/ Legislation	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Impact on the Company
7.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 ("Putusan MK 168/2023") Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023 ("MK Decision 168/2023")	Undang – Undang Cipta Kerja atau UU No. 6 Tahun 2023 ("UU Cipta Kerja") dan Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 ("Putusan MK 168/2023") adalah peraturan yang mengubah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Tenaga Kerja"). Walaupun UU Cipta Kerja mengubah UU Tenaga Kerja, tetapi peraturan tersebut bukan berarti tidak berlaku lagi. Terdapat pasal – pasal yang dipertahankan, dihapus dan disisipkan. Beberapa poin penting dalam UU Tenaga Kerja sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja dan Putusan MK 168/2023 adalah mengenai: 1. Perjanjian Kerja untuk Suatu Jangka Waktu Tertentu (PKWT); 2. Berakhirnya perjanjian kerja 3. <i>Outsourcing</i> 4. Jam waktu kerja 5. Pekerjaan yang melebihi waktu kerja atau lembur 6. Waktu istirahat 7. Pengupahan 8. PHK 9. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. The Job Creation Law or Law No. 6 of 2023 ("Job Creation Law") and Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023 ("Constitutional Court Decision 168/2023") are regulations that amend Law No. 13 of 2003 on Manpower ("Manpower Law"). Although the Job Creation Law amends the Labor Law, it does not mean that the regulation is no longer valid. There are articles that are retained, deleted and inserted. Some important points in the Labor Law as amended by the Job Creation Law and Constitutional Court Decision 168/2023 are: 1. Employment Agreement for a Fixed Term (PKWT); 2. Expiration of employment agreement 3. Outsourcing 4. Hours of working time 5. Work that exceeds working time or overtime 6. Break time 7. Wages 8. Layoffs 9. Settlement of industrial relations disputes.	Perusahaan menyesuaikan kebijakan internal, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja merujuk peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Putusan MK 168/2023 ini. The Company adjusts its internal policies, Company Regulations, Employment Agreements to refer to the prevailing laws and regulations including the Constitutional Court Decision 168/2023.
8.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 ("Permenaker 16/2024") Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 16 of 2024 concerning the Determination of Minimum Wage for 2025 ("Permenaker 16/2024")	Salah satu pokok utama Permenaker 16/2024 adalah kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 yang diinisiasi berdasarkan instruksi presiden untuk menaikkan upah minimum sebesar 6,5%. Pada akhirnya, kenaikan ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli pekerja sekaligus memperkuat daya saing usaha secara keseluruhan. One of the main points of Permenaker 16/2024 is the increase in the national minimum wage in 2025, which was initiated based on a presidential instruction to increase the minimum wage by 6.5%. Ultimately, this increase aims to maintain workers' purchasing power while strengthening overall business competitiveness.	Perusahaan dalam menentukan upah minimum karyawan agar merujuk pada Permenaker 16/2024. The Company in determining the minimum wage of employees should refer to Permenaker 16/2024.

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes in Regulations/ Legislation	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Impact on the Company
9.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan ("PMK 81/2024") Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 81 of 2024 on Taxation Provisions in the Framework of Implementing the core Tax Administration System ("PMK 81/2024")	PMK No. 81/2024 diterbitkan sebagai upaya Kementerian Keuangan ("Kemenkeu") dalam modernisasi administrasi perpajakan dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau yang biasa dikenal dengan Core Tax Administration System (CTAS), untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi bagi Wajib Pajak. Regulasi ini menjadi pijakan utama bagi implementasi system coretax yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 dan berdampak 42 (empat puluh dua) peraturan terkait perpajakan. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 81/2024 was issued as an effort of the Ministry of Finance ("MoF") in modernizing tax administration in the Core Tax Administration System (CTAS), to improve efficiency and transparency for taxpayers. This regulation becomes the main footing for the implementation of the coretax system which will be effective from January 1, 2025 and has an impact on 42 (forty-two) tax-related regulations.	IFG sebagai wajib pajak memiliki waktu hingga tanggal 15 bulan berikutnya untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. IFG as a taxpayer has until the 15th of the following month to complete its tax obligations.
10.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2025-2045 Law of the Republic of Indonesia Number 59 of 2024 concerning the national Long-Term Development plan for 2025-2045	UU 59/2024 diterbitkan Pemerintah Pusat sebagai landasan hukum dan Rencana Strategis arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang guna mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Nasional. Misi Pembangunan tersebut terdiri dari tiga (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama Pembangunan. Law No. 59/2024 was issued by the Central Government as a legal basis and Strategic Plan for Long-Term Development policy direction to achieve the vision of a Golden Indonesia 2045, which is realized through 8 (eight) Development Missions in the form of a National Development agenda. The Development Mission consists of three (3) transformations of Indonesia, 2 (two) transformation foundations, and 3 (three) transformation implementation frameworks. The agenda is implemented through 17 (seventeen) development directions measured through 45 (forty-five) key development indicators.	Alignment dengan UU ini diperlukan dalam menerapkan kebijakan atau rencana jangka panjang IFG. Alignment with the Law is necessary in implementing IFG's policies or long-term plans.
11.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan ("PP 41/2024") Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 41 of 2024 concerning Work Plan and Budget of the Financial Services Authority and Levies in the Financial Services Sector ("PP 41/2024")	PP 41/2024 ini diundangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36B dan Pasal 37 ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Government Regulation No. 41/2024 is promulgated to implement the provisions of Article 36B and Article 37 paragraph (4) of Law Number 21 of 2011 concerning OJK as amended by Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening.	Besaran biaya tahunan IFG dihitung sebesar 0,045% dari total aset dikurangi dengan aset seluruh Lembaga Jasa Keuangan yang dikonsolidasikan, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). The amount of IFG annual fee is calculated at 0.045% of total assets minus the assets of all consolidated Financial Services Institutions, at least IDR10,000,000.00 (ten million rupiah).